

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini didapatkan lima penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian dengan tema yang sama.

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang dipublikasikan dikutip dari beberapa jurnal dengan topik Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian pertama berjudul “Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Pada Pilkada 2018 Di Sumatera Utara” oleh Arifin Sihombing, Sutarto, M. Si, Besti Rohana Simbolon, dan Fredikus Laia. Sebagai Penyelenggara Pilkada 2018, KPU Provinsi Sumut berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah kinerja KPU Propinsi Sumatera Utara pada Pilkada 2018. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar, bukan angka seperti pada penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Medan di kantor KPU Propinsi dan beberapa instansi karena informan berasal dari partai pengusung kedua kandidat calon gubernur, Ombudsman, akademik dan KPU. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa, KPU Propinsi Sumatera Utara sudah bertugas dengan baik dan konsisten sesuai dengan tugas yang dibebankan atau yang diayominya. Dari sebelasinforman, delapansudah

berpendapat bahwa KPU Propinsi Sumatera Utara sudah memiliki kategori baik. Satu mengatakan kinerjanya tergolong netral, sudah berbuat tetapi belum signifikan dalam perbedaaan kualitas dari sebelumnya. Dua informan lainnya mengatakan kurang baik karena terdapatdi beberapa daerah dilakukan pemilihan ulang. Namun dari kemandirian, adil dan merata. KPU Provinsi tidak diintervensi oleh partai manapun dalam menjalankan tugasnya dan dalam penyebaran informasi seperti sosialisasi sudah melibatkan media massa sehingga masyarakat mengetahui semua tahapannya.KPU sudah menjalankan tugas dan fungsinyasesuai dengan aturan UU Pemiluyang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Pemilu.

(Jurnal Governance Opinion, Volume 4 Nomor 2, Januari 2020 hlm 115-130 ISSN 2716-3407).

2. Penelitian kedua berjudul “Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015” oleh Metiba Halawa dan Ignatius Adiwidjaja. Fenomena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang terjadi di Negara Indonesia cukup menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Gagasan tentang pemilihan Kepala Daerah semakin mendapat tempat dalam wacana publik Indonesia. Maka diperlukan peningkatan kinerja yang berorientasi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju good governance yakni untuk mencapai pemilihan serentak yang sesuai dengan harapan. Adapun tujuan peneliti ini adalah: 1) ingin mengetahui kinerja KPU Kabupaten Malang Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak, 2) ingin mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Pilkada serentak Tahun 2015 di KPU Kabupaten Malang. Dengan harapan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan yang berjuang untuk memenuhi

tuntutan aparatur Negara. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yang menggunakan langkah-langkah pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Selanjutnya untuk menganalisa data menggunakan model analisa data interaktif yang dikembangkan oleh Sugiyono yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh suatu kesimpulan; 1) Kinerja yang dilakukan KPU Kabupaten Malang dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2015 telah berjalan dengan optimal; 2) Faktor penghambat KPU dalam menghadapi pilkada serentak Tahun 2015; 3) Faktor pendukung KPU dalam menghadapi pilkada serentak Tahun 2015. (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5 Nomor 3, 2016 ISSN 2442-6962).

3. Penelitian ketiga berjudul “Analisis Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Palu” Oleh Ika Widya Syari. Kinerja Pegawai pada Sekretariat KPU Kota Palu, dalam penelitian ini dengan indikator kualitas pekerjaan diperoleh gambaran bahwa pegawai sekretariat KPU Kota Palu berkualitas atas pekerjaannya. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Apabila dilihat dari segi pendekatannya penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif. Hal ini dapat diukur melalui akurasi, ketelitian, keterampilan dan penerimaan keluaran, sedangkan kuantitas pekerjaan telah tercapai melalui volume keluaran dan penggunaan waktu, supervisi yang diperlukan memberikan manfaat atas peningkatan kinerja pegawai Sekretariat KPU Kota Palu, kehadiran atau disiplin pegawai rendah pada saat kegiatan apel pagi dan apel sore, akan tetapi pegawai Sekretariat KPU Kota Palu disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan walaupun dibebani ketambahan waktu kerja, konservasi dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan tidak terpeliharanya dengan baik sarana dan prasarana hal ini diakibatkan oleh keterbatasan tempat

penyimpanan yang dimiliki oleh Sekretariat KPU Kota Palu. Adapun Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat kinerja Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu yaitu kelembagaan bersifat vertikal, regulasi yang jelas sedangkan faktor penghambat dualisme kepemimpinan, sistem promosi dan mutasi pegawai. (e-Jurnal Katalogis, Volume 1 Nomor 2, Februari 2013 hlm 116-123 ISSN: 2302-2019).

4. Penelitian keempat berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah” oleh Petrus Gleko, Agung Suprojo, Asih Widi Lestari. Partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pilkada merupakan suatu aspek yang sangat penting sehingga Komisi Pemilihan Umum menggunakan strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Komisioner KPU, dengan penarikan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah:
1.Strategi KPU Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilkada Tahun 2015 dilihat dari tiga tahapan yaitu tahapan formulasi menunjukkan ada kejelasan perencanaan sosialisasi dari KPU. Kedua tahap pemilihan tindakan, KPU melaksanakan sosialisasi kepada delapan segmen pemilih dengan metode sosialisasinya yaitu berupa tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik segmen yang dituju. Ketiga tahap alokasi sumber daya yaitu dengan melakukan bimbingan teknis kepada panitia ad hoc. 2.Kendala yang dialami oleh KPU yaitu berupa minimnya anggaran, sikap apatis masyarakat, serta jumlah personil

KPU yang terbatas. (JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 6 No. 1 Tahun 2017)

5. Penelitian kelima berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula” oleh Megawati, Andi Tenri Padang. upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2018 antara lain melalui: 1) Penguatan Kelembagaan yaitu memperkuat kelembagaan KPU sampai ketingkat paling bawah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas PPK, PPS dan KPPS; 2) meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi, KPU menyiapkan segala informasi yang dibutuhkan melalui pelbagai kanal, sehingga publik dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada; 3) Program Sosialisasi Politik, yaitu dengan menyiapkan pelbagai metode sosialisasi, seperti tatap muka (face to face), Training Of Trainer, dan Rumah Pintar Pemilu. Sementara faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula diantaranya: tingkat pengetahuan dan kesadaran politik, minimnya pendidikan politik, kesibukan, dan sikap apatis yang disebabkan oleh perilaku aktor-aktor politik yang cenderung koruptif. (Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Star'iyah. Vol 2 No 3. September 2020 ISSN 2716-0394)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Latar Belakang	Teori dan Metode	Hasil Penelitian
1	<p>Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Pada Pilkada 2018 Di Sumatera Utara. Oleh : Arifin Sihombing, Sutarto, M. Si, Besti Rohana Simbolon, dan Fredikus Laia.</p> <p><i>Jurnal Governance Opinion, Volume 4 Nomor 2, Januari 2020 hlm 115-130 ISSN 2716-3407</i></p>	<p>Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan pelayanan dan kualitas kinerja KPU. Sebagai sebuah wadah organisasi pemerintah yang memiliki tugas dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil KPU Kota Medan harus memiliki prinsip budaya organisasi yang kuat. Sesuai dengan visi dan misi KPU Daerah Kota Medan</p>	<p>Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, KPU Propinsi Sumatera Utara sudah bertugas dengan baik dan konsisten sesuai dengan tugas yang dibebankan atau yang diayominya. Dari sebelasinforman, delapansudah berpendapat bahwa KPU Propinsi Sumatera Utara sudah memiliki kategori baik. Satu mengatakan kinerjanya tergolong netral, sudah berbuat tetapi belum signifikan dalam perbedaaan kualitas dari sebelumnya. Dua informan lainnya mengatakan kurang baik karena terdapatdi</p>

				beberapa daerah dilakukan pemilihan ulang.
2	<p>Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015. Oleh : Metiba Halawa dan Ignatius Adiwidjaja.</p> <p><i>Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5 Nomor 3, 2016 ISSN 2442-6962</i></p>	<p>Fenomena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang terjadi di Negara Indonesia cukup menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Gagasan tentang pemilihan Kepala Daerah semakin mendapat tempat dalam wacana publik Indonesia. Maka diperlukan peningkatan kinerja yang berorientasi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju good governance yakni untuk mencapai pemilihan serentak yang sesuai dengan harapan.</p>	<p>Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif.</p>	<p>Kinerja yang dilakukan KPU Kabupaten Malang dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2015 telah berjalan dengan optimal. Faktor penghambat KPU dalam menghadapi pilkada serentak Tahun 2015. Faktor pendukung KPU dalam menghadapi pilkada serentak Tahun 2015.</p>

3	<p>Analisis Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Palu. Oleh : Ika Widya Syari</p> <p><i>e-Jurnal Katalogis, Volume 1 Nomor 2, Februari 2013 hlm 116-123 ISSN: 2302-2019</i></p>	<p>Masalah kinerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tentu tidak terlepas dari proses, hasil dan daya guna, dalam hal ini kinerja pegawai merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.</p> <p>Penilaian terhadap kinerja para pegawai harus dilakukan pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, namun sayangnya penilaian terhadap kinerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota masih jarang dilakukan.</p>	<p>Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Kinerja Pegawai pada Sekretariat KPU Kota Palu, dalam penelitian ini dengan indikator kualitas pekerjaan diperoleh gambaran bahwa pegawai sekretariat KPU Kota Palu berkualitas atas pekerjaannya. Hal ini dapat di ukur melalui akurasi, ketelitian, keterampilan dan penerimaan keluaran, sedangkan kuantitas pekerjaan telah tercapai melalui volume keluaran dan penggunaan waktu, supervisi yang diperlukan memberikan manfaat atas peningkatan kinerja pegawai Sekretariat KPU Kota Palu, kehadiran atau disiplin pegawai rendah pada saat kegiatan apel pagi dan apel sore, akan tetapi</p>
---	--	--	---	---

				<p>pegawai Sekretariat KPU Kota Palu disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan walaupun dibebani ketambahan waktu kerja, konservasi dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan tidak terpeliharanya dengan baik sarana dan prasarana hal ini di akibatkan oleh keterbatasan tempat penyimpanan yang dimiliki oleh Sekretariat KPU Kota Palu. Adapun Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat kinerja Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu yaitu kelembagaan bersifat vertikal, regulasi yang jelas sedangkan faktor</p>
--	--	--	--	---

				<p>penghambat dualisme kepemimpinan, sistem promosi dan mutasi pegawai.</p>
4	<p>Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah.</p> <p>Oleh : Petrus Gleko, Agung Suprojo, Asih Widi Lestari.</p> <p><i>JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</i> ISSN. 2442-6962 Vol. 6 No. 1 Tahun 2017</p>	<p>Partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilukada merupakan suatu aspek yang sangat penting sehingga Komisi Pemilihan Umum menggunakan strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilukada</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi</p>	<p>1. Strategi KPU Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada Tahun 2015 dilihat dari tiga tahapan yaitu tahapan formulasi menunjukkan ada kejelasan perencanaan sosialisasi dari KPU. Kedua tahap pemilihan tindakan, KPU melaksanakan sosialisasi kepada delapan segmen pemilih dengan metode sosialisasinya yaitu berupa tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik</p>

				<p>segmen yang dituju. Ketiga tahap alokasi sumber daya yaitu dengan melakukan bimbingan teknis kepada panitia ad hoc.</p> <p>2. Kendala yang dialami oleh KPU yaitu berupa minimnya anggaran, sikap apatis masyarakat, serta jumlah personil KPU yang terbatas.</p>
5	<p>Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula.</p> <p>Megawati, Andi Tenri Padang</p> <p><i>Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Star'iyah</i> Volume 2 Nomor 3 September</p>		<p>Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (conceptual and statute approach).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2018 antara lain melalui:</p> <p>1) Penguatan Kelembagaan yaitu memperkuat kelembagaan KPU sampai</p>

	<p>2020 ISSN <u>2716-0394</u></p>		<p>ketingkat paling bawah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas PPK, PPS dan KPPS;</p> <p>2) meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi, KPU menyiapkan segala informasi yang dibutuhkan melalui pelbagai kanal, sehingga publik dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada; 3) Program Sosialisasi Politik, yaitu dengan menyiapkan pelbagai metode sosialisasi, seperti tatap muka (face to face), Training Of Trainer, dan Rumah Pintar Pemilu.</p> <p>Sementara faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi</p>
--	---------------------------------------	--	--

				<p>pemilih pemula diantaranya: tingkat pengetahuan dan kesadaran politik, minimnya pendidikan politik, kesibukan, dan sikap apatis yang disebabkan oleh perilaku aktor-aktor politik yang cenderung koruptif.</p>
--	--	--	--	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu terdapat perbedaan dimana pada penelitian ini berfokus pada Kinerja Organisasi dalam upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah dengan menggunakan teori dari Agus Dwiyanto yang menyangkut dengan Pengukuran Kinerja Organisasi. Penelitian ini juga membahas tidak hanya pada kinerja KPU Kota Tangerang Selatan dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota saja, namun juga bagaimana kinerja KPU Kota Tangerang Selatan dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi masyarakat di Kota Tangerang Selatan serta lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

2.2 Kinerja Organisasi

2.2.1 Kinerja

Kinerja dalam arti sempit adalah hasil kinerja yang dilakukan seorang pegawai dalam menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya yang dilakukan secara ikhlas. Banyak pendapat mengenai kata kinerja, ada pendapat yang menyatakan kinerja merupakan hasil, sementara ada pendapat lain yang menyatakan kinerja itu merupakan suatu proses.

Untuk lebih memahami arti kata kinerja ini dapat dilihat dari beberapa definisi dari beberapa pakar yaitu Ndraha (2003:196) menyatakan bahwa kata kinerja adalah kosa kata baru dalam bahasa Indonesia, digunakan sebagai padanan kata *performance*. Berdasarkan teori dari sudut *accountability* (pertanggungjawaban), kinerja adalah pelaksanaan tugas atau perintah (*task accomplishment*), dari segi *obligation* (kewajiban) kinerja adalah kewajiban untuk menepati janji. Dari segi *cause* (sebab) kinerja adalah proses tindakan yang diambil menurut keputusan batin berdasarkan pilihan bersama pelaku pemerintahnya yang bersangkutan dan kesiapan memikul segala resiko atau konsekuensinya.

Prawirosentono (1999:2) menyatakan bahwa *performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang didalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal dan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Sedangkan menurut Bastian (2001:329) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tersebut.

Irawan (1997:1) menyatakan bahwa kinerja atau *performance* adalah hasil kerja seseorang pekerja, sebuah proses manajemen atau organisasi secara keseluruhan dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan dan dibuktikan secara konkrit serta dapat diukur dengan standar yang telah ditentukan. Dan pendapat lain juga dikemukakan oleh Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) yang mana menyatakan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja seseorang pegawai secara personal maupun kerja tim dalam suatu lembaga atau organisasi yang sesuai dengan tujuan dan

tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan bersama yaitu tujuan organisasi itu sendiri yang telah diatur dalam perundang-undangan dan hukum negara yang berlaku.

2.2.2 Organisasi

Menurut Pradjudi Armosudiro (2006:12) Organisasi merupakan suatu struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.

Menurut Mooney (2006:23) organisasi adalah bentuk perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Akan tetapi perlu difahami bahwa yang menjadi dasar organisasi bukan siapa akan tetapi adanya yang berarti bahwa yang dipentingkan adalah bukan siapa orang yang memegang organisasi tersebut tetapi apakah tugas dan fungsi dari organisasi.

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi positif seperti pendayagunaan sumberdaya manusia serta sumber daya alam yang dikelola dengan baik sehingga membentuk suatu keadaan yang menguntungkan bagi organisasi tersebut dan juga masyarakat disekitar serta tidak melanggar hukum yang berlaku.

2.2.3 Kinerja Organisasi

Untuk menilai kinerja organisasi tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukur secara jelas. Tanpa indikator yang jelas tidak akan ada arah yang jelas untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif antara alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain organisasi yang berbeda dan diantara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda.

Kinerja organisasi menurut Surjadi (2009:7), kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Tercapainya suatu tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Swanson (dalam Keban, 2004:193), kinerja organisasi adalah mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik dan budaya yang ada; apakah struktur dan kebijakannya mendukung kinerja yang diinginkan; apakah memiliki kepemimpinan, modal dan infrastruktur dalam mencapai misinya; apakah kebijakan, budaya dan sistem insentifnya mendukung pencapaian kinerja yang diinginkan; dan apakah organisasi tersebut menciptakan dan memelihara kebijakan-kebijakan seleksi dan pelatihan dan sumber dayanya.

Kinerja organisasi menurut Bastian (2001:329) sebagian gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tersebut. Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuannya yang tentu saja dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa fisik sumber daya manusia maupun nonfisik seperti peraturan, informasi dan kebijakan. Maka untuk lebih memahami mengenai faktor-faktor yang mampu mempengaruhi sebuah kinerja organisasi.

Konsep kinerja organisasi juga menggambarkan bahwa setiap organisasi publik dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat dilakukan pengukuran berdasarkan indikator-indikator yang ada untuk melihat apakah organisasi tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik serta untuk mengetahui pencapaian tujuan organisasi tersebut sudah dicapai atau belum.

2.2.4 Indikator Pengukuran Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Organisasi Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (Mahsun, 2006:71). Sementara menurut Lohman (dalam Mahsun, 2006:71) indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses dengan pedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Berdasarkan beberapa definisi diatas, indikator kinerja adalah kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Untuk menilai kinerja organisasi ini tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain organisasi yang berbeda, dan diantara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda. Dalam organisasi publik, sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai. Bila dikaji dari tujuan dan misi utama dari suatu organisasi publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik. Ukuran kinerja organisasi publik terlihat sederhana, namun tidaklah demikian kenyataannya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang ukuran kinerja organisasi publik. Berkaitan dengan kesulitan yang terjadi dalam pengukuran kinerja organisasi publik ini dikemukakan oleh Agus Dwiyanto ialah sebagai berikut : “Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi pelayanan publik sebagian muncul karena tujuan dan misi

organisasi publik seringkali bukan hanya kabur akan tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders dari organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu dengan yang lainnya, akibatnya ukuran kinerja organisasi publik dimata para stakeholders juga menjadi berbeda-beda” (Dwiyanto, 2008:49). Namun berdasarkan pemahaman terhadap tujuan dan misi organisasi, Levine mengusulkan tiga konsep untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu: responsiveness, responsibility, dan accountability. Sedangkan Dwiyanto (2008:50-51), menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yaitu :

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan oleh media. Dalam suatu birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

b. Responsivitas

Responsivitas yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasannya antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.

Organisasi yang memiliki responsivitas rendah memiliki kinerja yang jelek juga.

c. **Responsibilitas**

Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi baik yang implisit ataupun yang eksplisit. Semakin kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, peraturan dan kebijaksanaan organisasi maka kinerja yang dinilai adalah semakin baik.

Berdasarkan pengertian diatas maka untuk mengukur kinerja organisasi terdiri dari akuntabilitas, responsivitas dan responsibilitas. Akuntabilitas dari suatu organisasi dapat dilihat dari ukuran target yang didapat, responsivitas dapat dilihat dari prosedur dan keinginan masyarakat, responsibilitas dapat dilihat dari tanggung jawab dan administrasi pelayanan.

Sedangkan menurut Kumorotomo (dalam Dwiyanto, 2008:52- 53), ada beberapa kriteria dalam menilai organisasi pelayanan publik, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Efisiensi, menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
- b. Efektivitas Salah satu faktor yang berkaitan dengan keberhasilan suatu organisasi adalah kemampuannya untuk mengukur seberapa baik semua komponen organisasi bekerja dan menggunakan informasi, guna memastikan bahwa pelaksanaannya memenuhi standar sekarang dan meningkat sepanjang waktu. Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf

tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

- c. Keadilan, mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.
- d. Daya tanggap Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas maka selain pendapat dari teori Agus Dwiyanto, untuk mengukur kinerja organisasi publik dapat diukur dari efisiensi, efektivitas keadilan dan daya tanggap. Keempat ukuran ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dari mulai pertimbangan dari suatu manfaat yang didapat yang sesuai dengan visi dan misi yang ditentukan sehingga keadilan akan dirasakan kemudian daya tanggap kepada masyarakat lebih optimal.

Sedangkan menurut Mahsun dalam bukunya Pengukuran Kinerja Sektor Publik terdapat beberapa indikator dalam kinerja organisasi ialah sebagai berikut :

- a. Masukan (input)

Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti dana, SDM dan sumber daya yang dimiliki.

- b. Proses (process)

Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketetapan, maupun tingkat akurasi

pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah masukan. Sedangkan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar biaya dan waktu yang telah ditentukan untuk itu.

c. Keluaran (output)

Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.

d. Hasil (outcomes)

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator keluaran lebih utama dari sekedar keluaran. *Outcomes* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin mencangkup kepentingan banyak pihak.

e. Manfaat (benefit)

Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut akan dirasakan setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang.

f. Dampak (impact)

Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif ataupun negatif (Mashun, 2006:77-78)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa kinerja organisasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai dimensi seperti dimensi dari mulai produktifitas, kualitas layanan, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsivitas, responsibilitas, keadilan, daya tanggap,

masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, bahkan dampak dari suatu kebijakan atau program tersebut, setiap dimensi saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya.

Kinerja organisasi merupakan suatu konsep yang disusun dari berbagai indikator yang bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya untuk mencapai tujuan yang telah atau ingin dicapai oleh suatu organisasi atau instansi. Sedangkan indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja organisasi yakni menurut Dwiyanto (2008:50-51) dalam bukunya yang berjudul Reformasi Kebijakan Publik mengemukakan terdapat 5 indikator untuk mengukur kinerja yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Produktivitas: Konsep produktivitas tidak hanya mengukur efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Produktivitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuannya, artinya sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Kualitas Layanan: Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjalankan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negatif yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layananan dijadikan indikator kinerja organisasi publik.
3. Responsivitas: Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagai salah satu indikator kinerja responsivitas secara langsung

menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.

4. **Responsibilitas:** Menjelaskan/mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan organisasi.
5. **Akuntabilitas:** Seberapa besar kebijakan dan kegiatan publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai dan norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh *stakeholders*.

2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Menurut Prawirosentono (1999:27) dalam buku Kebijakan Kinerja Karyawan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu:

a. Efektivitas dan efisiensi

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efisien.

b. Otoritas (wewenang)

Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya. Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut.

c. Disiplin

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja. d. Inisiatif Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai faktor seperti efektivitas dan efisiensi, otoritas, disiplin, inisiatif, kemampuan, motivasi serta lingkungan pekerjaan, setiap faktor memiliki pengaruh pada kinerja organisasi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pendapat Griffin (dalam Sule dan Saefullah, 2005:235) yaitu kemampuan kerja, motivasi dan lingkungan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Kemampuan, yaitu kapabilitas dari tenaga kerja atau SDM untuk melakukan pekerjaan;
- 2) Motivasi, yaitu yang terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan;
- 3) Lingkungan pekerjaan, yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut.

2.3 Pemilihan Umum

2.3.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial antara peserta pemilihan umum yang mana diisi dari partai politik atau perorangan dengan pemilih itu sendiri yakni masyarakat yang memiliki hak pilih setelah melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak ataupun elektronik

serta berbentuk *face to face* (tatap muka) atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program dan janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih agar menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik/peserta perorangan yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif. (Firmanzah, 2008: 272)

Pemilihan Umum adalah Pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan atau pencontrengan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat menjadi anggota legislatif, atau menjadi kepala pemerintahan. Fungsi pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota legislatif atau kepala pemerintahan. Sementara tujuan dari pemilu ada tiga, antara lain:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
2. Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada legislatif maupun eksekutif sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. (Solihah, dkk, Jurnal Wacana Politik. Vol 3, No 1, Maret 2018).

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. selain itu dalam UUD 1945 Pasal 22 E ayat 1 diartikan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilu sebagaimana kita pahami merupakan perwujudan dari negara yang menganut sistem demokrasi. Sutoro Eko (2006) mengemukakan bahwa pemilu yang demokratis (kompetitif, liberal, dan partisipatif) membutuhkan partisipasi pemilih yang rasional-otonom, yaitu pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara bebas, terbuka, dan mandiri dengan menggunakan referensi secara rasional berdasarkan ideologi dan program partai.

William Liddle (Efriza, 2012:358) menyatakan bahwa: “Dalam sistem pemerintahan demokrasi, Pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut UU, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu.”

Selanjutnya Aurel Croissant (Andrianus Pito, 2013:298-299), juga memberikan pendapatnya mengenai Pemilu. Croissant menegaskan bahwa: “Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi, Pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar Pemilu. Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada Pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga meligitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran ini ialah sistem Pemilu. Pemilu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu sejatinya adalah proses demokratisasi sebuah bangsa. Karena dengan adanya Pemilu dapat menyalurkan hasrat rakyat untuk memberikan suaranya kepada negaranya sehingga rakyat merasa sudah memberikan partisipasinya dalam bidang politik dan bernegara serta memberikan ruang gerak bagi pemerintah dan penguasa agar tidak dicap (diberi label otoriter) (Solihah,dkk, 2018)

2.3.2 Asas dan Fungsi Pemilihan Umum

Asas-asas Pemilu (Andrianus, 2013) diantaranya:

- a. Berkala; Pemilu dilaksanakan secara teratur sesuai dengan konstitusi dan ketentuan yang diatur oleh negara yang bersangkutan.
- b. Langsung; Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat dan di pemerintahan.
- c. Umum; Pemilu diikuti oleh setiap orang yang sudah memenuhi syarat.
- d. Bebas; Ketika memberikan suara, pemilih tidak mendapat tekanan dari pihak manapun yang memungkinkan dia memberikan suara tidak sesuai dengan hati nuraninya.
- e. Rahasia; Kerahasiaan pemberi suara atas calon atau organisasi/ parpol peserta Pemilu yang dipilihnya tidak akan diketahui oleh siapapun, termasuk panitia pemungutan suara.
- f. Jujur; Tidak diperbolehkan terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, baik oleh penyelenggara yang memanipulasikan suarasuara untuk kepentingan parpol/organisasi tertentu maupun para peserta Pemilu.
- g. Adil; Perlakuan yang sama akan didapat oleh penyelenggaraan dan peserta setiap diadakannya Pemilu.

Andrew Haywood (dalam Pamungkas, 2009:4-5) merumuskan fungsi Pemilu dalam dua perspektif yaitu :

1. Perspektifbottom-up; Pemilu dalam perspektif ini dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggung jawab dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana kebijakan merefleksikan opini publik. Termasuk dalam perspektif bottom-up diantaranya adalah fungsi Pemilu sebagai rekrutmen politisi dan membentuk pemerintahan.
2. Perspektiftop-down. Pemilu dilihat sebagai sarana elit melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak/diam (quiescent), dapat ditundukkan (malleable) dan pada akhirnya dapat diperintah (governable). Selain itu, Pemilu juga menjadi sarana dimana elit dapat memanipulasi dan mengontrol massa. Termasuk dalam perspektif top-down fungsi Pemilu adalah sebagai memberikan legitimasi kekuasaan

Lebih lanjut dinyatakan bahwa, selain kedua perspektif di atas yang bersifat vertikal, terdapat juga fungsi Pemilu lainnya yang bersifat horizontal.Kedua fungsi tersebut yakni pertama sebagai arena pengelolaan konflik kepentingan dan kedua sebagai sarana menciptakan kohesi dan solidaritas sosial.Slogan asas Pemilu pada masa Orde Baru disingkat menjadi Luber, setelah bergulirnya Orde Reformasi ditambahkan kata dibelakangnya dengan Jurdil.Pelaksanaan asas Luber dan Jurdil ini tidak bisa langsung kita berikan pada saat Pemilu berlangsung, karena memang harus banyak hal yang dikaji untuk bisa mengatakan bahwa Pemilu tersebut sudah maksimal menggunakan asas Luber dan Jurdil.

2.4 Partisipasi Politik

2.4.1 Pengertian Partisipasi Politik

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris “participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikut sertaan

(Rohendi 2009:54). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pilihan, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan menurut (Rahmana 2007:9) dikutip dalam jurnal Haryono. Beberapa ahli mendefinisikan partisipasi politik sebagai berikut:

1. (Sukanto 2010:67): Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau suatu kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam suatu kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.
2. (Rafael 2001:78) : Partisipasi politik adalah memberikan perhatian pada cara warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan mereka agar mampu mewujudkan kepentingan tersebut.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah “public policy”. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum; menghadiri rapat umum; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya (Rusadi 2004:26). Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya (Suryadi, 2007:29)

Di kebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas (Gradien 2012:52). Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan. Rakyat menjadifaktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (Ariani 2013:45) dalam jurnal Maslelah.

Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada di setiap pemilihan umum. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap

sehat jika jumlah golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 persen bahkan ada yang lebih.

(Sukanto 2010:11) mengklasifikasikan golput atas empat golongan. Pertama, golput teknis, yakni mereka yang karena sebabsebab teknis tertentu berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. Kedua, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Ketiga, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Landasan partisipasi politik (Hakim 2010:67) adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi Kelas. individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.

Kelompok atau komunal – individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa. lingkungan – individu-individu yang jarak tempat tinggal berdekatan. partai – individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan golongan atau faksi – individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk

hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

Jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. (Zak 2013:43) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

1. Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
2. Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
3. Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
4. Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
5. Tindakan Kekerasan (violence) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

Selain bentuk partisipasi diatas, ilmuan politik mengidentifikasi beberapakecenderungan perilaku politik masyarakat, Michael Rush dan Althoff (2003:131) dalam Efriza (2012:170) menyebutkan kan sebagai berikut :

- a. Apatisme (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala;
- b. Sinisme diartikan sebagai “kecurigaan yang busuk dari manusia”, dalam hal ini dia melihat bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya dan menganggap partisipasi politik dalam bentuk apa pun sia-sia dan tidak ada hasilnya;
- c. Alienasi sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat dan kecenderungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain tidak adil;
- d. Anomie sebagai suatu perasaan kehidupan nilai dan ketiadaan awal dengan kondisi seorang individu mengalami perasaan ketidak efektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Milbrath dalam Maran (2001: 156) menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, antara lain:

- a. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini, minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau diskusi informal;
- b. Faktor karakteristik pribadi seseorang; orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, dan lainnya, biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik;

- c. Faktor karakter sosial seseorang; hal ini menyangkut status social ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan lainlainnya tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itu, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik;
- d. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri; lingkungan yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

2.5 Kerangka Konsep

Pengukuran kinerja organisasi membutuhkan adanya analisis yang tepat agar tujuan organisasi yaitu KPU Kota Tangerang Selatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan dapat tercapai dengan optimal. Metode yang seharusnya dilakukan yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi yang telah disusun secara terarah dan terencana. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat langsung kondisi yang ada dilapangan, apakah kinerja KPU Kota Tangerang Selatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan sudah dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan/sasaran yang sudah ditetapkan.

Untuk dapat mengukur kinerja KPU Kota Tangerang Selatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan walikota dan

wakil walikota Tangerang Selatan tahun 2020, maka digunakan teori yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2008:50). Dalam teori tersebut terdapat lima indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu :

1. Produktivitas

Produktivitas adalah Rasio output dan input terkait dengan kinerja KPU Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini ingin mengetahui sejauh mana organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020, yang meliputi :

- a. Input adalah bagian awal yang akan dilaksanakan KPU Kota Tangerang Selatan berupa rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020;
- b. Bagaimana program dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020;
- c. Output adalah hasil atau capaian dari KPU Kota Tangerang Selatan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan adalah pelayanan yang diberikan KPU Kota Tangerang Selatan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020, adapun pelayanan yang diberikan dengan langkah-langkah berikut :

- a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi;
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memberikan informasi mengenai

pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota
Tangerang Selatan

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan KPU Kota Tangerang Selatan dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas program sesuai dengan kebutuhan yang meliputi :

- a. Daya tangkap dalam memberikan pelayanan yang cepat dan menerima masukan-masukan serta menindaklanjuti masukan tersebut yang berkaitan dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020;
- b. Keinginan masyarakat adalah harapan yang diinginkan masyarakat dari pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020 dapat transparan, independen dan dipercaya.

4. Responsibilitas

Responsibilitas adalah bagaimana tindakan KPU Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020, yang meliputi:

- a. Tanggung jawab adalah kesediaan diri untuk menghadapi resiko terburuk, memberikan kompensasi atau informasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020;
- b. Kerjasama adalah upaya yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan dengan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama membantu dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020. Tingkat kesesuaian dapat dilihat seberapa besar kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan hasil dari indikator-indikator tersebut, maka digunakan pedoman wawancara, studi pustaka dan melakukan observasi lapangan. Untuk menghubungkan antara data yang diperoleh antara indikator kinerja organisasi terhadap intensitas pencapaiannya, maka digunakan teknik analisis data untuk menilai sesuai dan ketidaksesuaian antara fakta dengan pencapaian. Sebagai lanjutan proses analisis data maka dilakukan uji keabsahan data sebagai prasyarat dasar untuk menjadi faktor koreksi terhadap hasil analisis.

Berdasarkan konsep tersebut, maka dibuat kerangka berpikir sebagaimana gambar berikut :

Kerangka Pikir Penelitian

